

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Ketentuan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan untuk menyelesaikan sengketa secara damai ini, pada mulanya dicantumkan dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam yang melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu hukum internasional telah menyusun berbagai cara penyelesaian sengketa secara damai

dan menyumbangkannya kepada masyarakat dunia demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya pergaulan antar bangsa yang serasi.

Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/ 2625/ XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai, yaitu sebagai berikut:

- Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat menagancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.
- Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara
- Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
- Prinsip persamaan kedaulatan negara.
- Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara.
- Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.
- Prinsip keadilan dan hukum internasional.³⁶

Kata *dispute* mengandung pengertian pertikaian atau sengketa dimana keduanya yang dipergunakan secara bergantian John G. Merrills (1991:1). John G. Merrills memahami suatu persengketaan sebagai terjadinya perbedaan

³⁶ Boer Mauna, *Op. cit*, hlm. 193-194

pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lainnya. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan, yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Persoalan yang timbul adalah apa yang bisa dijadikan sebagai subjek persengketaan. Menurut John G. Merrills subyek dari persengketaan dapat bermacam-macam, mulai dari sengketa mengenai kebijakan suatu negara sampai persoalan perbatasan John G. Merrills (2003: 529). Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan ke dalam dua kategori yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan (A.A.S.P. Dian Saraswati, 2007:19).

Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. J.G. Starke mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat yaitu sebagai berikut (J.G. Starke, 2007: 646): arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Sementara itu, F. Melihat pandangan ahli hukum di atas maka dapat terlihat bahwa penyelesaian sengketa secara damai pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan:

1. Arbitrasi

Arbitrasi adalah sebuah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian suatu

kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepada para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Menurut F. Sugeng Istanto, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat.

Sementara itu, Moh. Burhan Tsani (1990:109), menyatakan arbitrase adalah suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, Konvensi Den Haag Pasal 37 Tahun 1907 memberikan definisi arbitrase internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional oleh hakim-hakim pilihan mereka dan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum internasional. Dengan penyelesaian melalui jalur arbitrase ini negara-negara harus melaksanakan keputusan dengan itikad baik.

Hakikatnya arbitrase ialah prosedur penyelesaian sengketa konsensual dalam arti bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara-negara bersengketa yang bersangkutan. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan perbuatan suatu *compromise*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa lahir (*clause compromissoire*). Penyerahan sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan menempatkannya didalam perjanjian internasional antara negara-negara yang bersangkutan. Perjanjian internasional itu mengatur pokok sengketa yang

dimintakan arbitrase, penunjukkan tribunal arbitrase, batas wewenang arbitrase, prosedur arbitrase, dan ketentuan yang dijadikan dasar pembuatan keputusan arbitrase.

2. Penyelesaian Yudisial (*Judicial Settlement*)

Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan dari suatu kaidah-kaidah hukum. Peradilan yudisial ini menurut F. Sugeng Istanto juga dapat disamakan dengan suatu peradilan internasional. Peradilan Internasional penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum yang dibentuk secara teratur. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Pengadilan internasional permanen contohnya adalah Mahkamah Internasional (ICJ). Peradilan internasional berbeda dengan arbitrase internasional dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut: Mahkamah secara permanen merupakan sebuah pengadilan, yang diatur dengan statuta dan serangkaian ketentuan prosedurnya yang mengikat terhadap semua pihak yang berhubungan dengan Mahkamah; Mahkamah memiliki panitera atau *register* tetap, yang telah menjalankan semua fungsi yang diperlukan dalam menerima dokumen-dokumen untuk arsip, dilakukan suatu pencatatan dan pengesahan, pelayanan umum Mahkamah, dan bertindak sebagai saluran komunikasi tetap dengan pemerintah dan badan-badan lain; Proses peradilan dilakukan secara terbuka, sementara pembelaan-pembelaan dan catatan-catatan dengan pendapat serta keputusan-keputusannya dipublikasikan; Pada prinsipnya Mahkamah dapat dimasuki oleh

semua negara untuk proses penyelesaian yudisial segala kasus yang dapat diserahkan oleh negara-negara itu kepadanya dan semua masalah khususnya yang diatur dalam traktat dan konvensi yang berlaku; Pasal 38 Statuta Mahkamah secara khusus menetapkan bentuk hukum yang berbeda-beda yang harus diberlakukan Mahkamah di dalam perkara-perkara dan masalah-masalah yang telah diajukan kepadanya, tanpa menyampingkan Mahkamah untuk dapat memutuskan suatu perkara *ex aequo et bono* apabila para pihak setuju terhadap cara tersebut (meskipun bukan *ex aequo et bono* dalam pengertian yang kaku.

Menurut F. Sugeng Istanto (1998:94), peradilan internasional berbeda dengan arbitrase internasional yakni ketentuan yang dijadikan dasar pembuatan keputusan dan sifat acaranya. Peradilan internasional memutuskan masalah yang diajukan kepadanya pada prinsipnya hanya berdasarkan pada ketentuan hukum, sedangkan arbitrase internasional dapat memutuskan masalah yang diajukan kepadanya dapat berdasarkan ketentuan hukum ataupun berdasarkan kepatutan dan kebaikan dan di samping itu acara dalam peradilan internasional yang pada prinsipnya adalah terbuka, sedangkan arbitrase internasional adalah tertutup.³⁷

3. Negoisasi

Dari berbagai macam mekanisme penyelesaian sengketa, negoisasi adalah mekanisme yang paling pertama disebutkan dalam Pasal 33 UN Charter. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa negoisasi adalah cara prinsipil dalam menangani

³⁷ Dewa Gede sudika Mangku, *Suatu kajian umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk didalam Tubuh ASEAN*, artikel pada Jurnal Hukum Internasional, Vol. 17 No. 3, September 2012, hlm. 150-151

penyelesaian sengketa internasional. Dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional, negosiasi lebih sering digunakan daripada seluruh mekanisme lain.

Negosiasi biasanya adalah mekanisme pertama yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa; bahkan ketika penyelesaiannya dirujuk ke arbitrase atau penyelesaian yudisial, poin-poin yang hendak dimintakan penyelesaian ditentukan dengan cara negosiasi. Negosiasi dapat dilaksanakan dalam suasana yang penuh privasi sehingga lebih mudah untuk mencapai kesepakatan. Ketika suatu sengketa masuk ke tahap yang lebih formal dan publik, akan lebih sulit, setidaknya secara politis, untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dikarenakan para pihak menjadi lebih banyak dan “berkubu” serta di depan publik, para pihak tidak mau terlihat banyak berkompromi.

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian secara damai sengketa internasional oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa setelah lahirnya masalah yang dipersengketakan. Dalam hal ini organ tersebut mengajukan usul-usul penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Komisi konsiliasi bukan saja bertugas mempelajari fakta-fakta akan tetapi juga harus mempelajari sengketa dari semua segi agar dapat merumuskan suatu penyelesaian.³⁸

³⁸ Boer Mauna, *Op. cit*, hlm. 212

5. Mediasi dan Jasa-Jasa Baik (*Good Offices*)

Mediasi biasanya adalah mekanisme *ad hoc* yang melibatkan intervensi dari pihak ketiga dalam upaya mempertemukan klaim para pihak dengan mengajukan sebuah rekomendasi penyelesaian. Mediasi kurang tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa terkait interpretasi maupun aplikasi dari perjanjian internasional karena proses mediasi lebih bersifat politis.

Jasa-jasa baik (*good offices*) adalah mekanisme yang mirip dengan mediasi (istilahnya bahkan seringkali dipertukarkan), yaitu melibatkan juga pihak ketiga biasanya Sekretaris Jenderal PBB atau wakil khususnya yang memberikan asistensi berimbang dalam upaya menyelesaikan sengketa. Prosesnya juga memiliki kelemahan yang sama dengan mediasi.

Mediasi dan jasa-jasa baik pada dasarnya adalah suatu negosiasi antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mediator sebagai pihak yang aktif, berwenang, malah diharapkan untuk mengajukan proposal yang *fresh* yang tidak terpikirkan oleh kedua pihak serta untuk menginterpretasi dan mempertemukan proposal para pihak yang bersengketa. Hal yang membedakan mediasi dengan konsiliasi adalah bahwa mediasi umumnya mengajukan rekomendasi penyelesaian secara informal dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh kedua belah pihak; tidak seperti konsiliasi yang menggunakan jasa investigasi tersendiri, meskipun dalam praktek perbedaannya sangat kabur.³⁹

³⁹ http://www.academia.edu/25542895/penyelesaian_sengketa_internasional, diakses pada tanggal 28 Juli 2017

6. Pencarian Fakta (*Inquiry*)

Ketika terjadi pertikaian mengenai fakta dari suatu persoalan, metode *inquiry* dapat dipandang paling tepat. Sebab metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan kemudian. Dengan dasar bukti-bukti dan permasalahan yang timbul badan ini akan dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya.

Tujuan dari pencarian fakta untuk mencari fakta yang sebenarnya adalah membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa di antara dua negara, yaitu mengawasi pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional, memberikan informasi guna membuat putusan di tingkat internasional. Pencarian fakta oleh J. G. Starke, disarankan dengan istilah penyelidikan, tujuan dari penyelidikan tanpa membuat rekomendasi-rekomendasi yang spesifik adalah untuk menetapkan fakta yang mungkin diselesaikan dan dengan cara demikian memperlancar suatu penyelesaian sengketa yang dirundingkan.⁴⁰

7. Penyelesaian dibawah Naungan Organisasi PBB

Diantara organisas-organisasi internasional dan regional yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional jelaslah bahwa PBB mempunyai tempat khusus karena kegiatan-kegiatannya mencakup hampir semua bidang dengan peranan utamanya yang diberikan masyarakat internasional yaitu: menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Agar keamanan dan perdamaian

⁴⁰ Dewa Gede sudika Mangku, Op. cit, hlm. 155

dapat terjamin demi keselamatan umat manusi, tentu sengketa-sengketa yang terjadi harus diselesaikan secara damai. Dibidang ini peranan PBB sangat penting.

Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB menyatakan bahwa: *anggota-anggota PBB harus menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mereka secara damai sebegitu rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional maupunkeadilan tidak terancam*. Bila diperhatikan, kewajiban ini hanya yang bertalian dengan sengketa-sengketa internasional saja. Ini berarti bahwa PBB menghormati prinsip non intervensi terhadap soal intern negara-negara anggota sesuai dengan Pasal 2 ayat 7 Piagam.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tentang Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Ciuncil*)

Perkembangan hukum internasional pasca perang dunia kedua mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali, karena sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah banyak ketentuan-ketentuan hukum internasional baru telah berhasil di rumuskan oleh negara-negara internasional serta mengkodifikasiannya yang dilaksanakan oleh organ PBB yang mempunyai tugas khusus dibidang ini, yaitu Internatioal Law Commission (ILC).

Terganggunya perdamaian dan keamanan internasional karena perang sudah barang tentu harus diselesaikan menurut hukum internasional yang berlaku, dan tugas ini ditangan PBB. Secara lebih khusus lagi tugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ini oleh masyarakat internasional telah di

⁴¹ Boer Mauna, *Op. cit*, hlm. 215

bebankan kepada Dewan Keamanan PBB. Fungsi yang dilaksanakan oleh Dewan Keamanan PBB tersebut adalah dalam upaya untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum internasional, khususnya yang tercantum dalam piagam PBB.⁴²

Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Organization*) dapat dipandang sebagai kelanjutan dari pada Liga Bangsa-Bangsa yang telah dibubarkan karena kegagalannya dalam menjalankan tugas dan mencegah Perang Dunia II 1939 terjadi. Pada awal terjadinya Perang Dunia II, para pemimpin dunia serta negarawan dari berbagai negara kembali memikirkan usaha-usaha yang dapat ditempuh dalam menciptakan dan pemeliharaan perdamaian dunia. Organisasi PBB berdiri setelah melalui proses permufakatan dan perjanjian-perjanjian perdamaian, selama berlangsungnya Perang Dunia II pasca Perang Dunia II.

Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Peresiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mengadakan pertemuan di atas kapal Augusta di teluk New Foundland. Pertemuan itu menghasilkan suatu piagam yang disebut *Atlantic Charter*.⁴³ Piagam ini disepakati sebagai dasar berdirinya organisasi internasional yang baru, untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam melaksakan tugasnya. Isi Pokok *Atlantic Charter* yaitu perlu adanya kesepakatan dan kerjasama antarbangsa dan antarnegara dalam menyelesaikan sengketa-

⁴² Syafrinaldi, *Hukum Internasional: Antara Harapan dan Kenyataan*, UIR Press, Jakarta, 2005, hlm. 61-63

⁴³ Konferensi Atlantik diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1941 antara Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dan Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris). Konferensi Atlantik sebagai pondasi berdirinya PBB.

sengketa internasional. Sebagai kelanjutan dari disepakatinya *Atlantic Charter*, maka pada permulaan tahun 1945 wakil-wakil dari 50 negara yang disponsori oleh 4 negara besar yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan China berkumpul di San Fransisco (USA) untuk membicarakan dan membentuk organisasi sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa.

Proposal-proposal Dumbarton Oaks menyatakan perlunya suatu organ eksekutif dengan anggota terbatas yang akan dipercaya untuk “mengemban kewajiban utama memelihara perdamaian dan keamanan internasional”. Mengembangkan tingkat sentralisasi prosedur untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang berbeda jika dibandingkan Liga, membuat Dewan Keamanan menjadi lebih penting daripada Council pada Liga. Yang diperlukan disini adalah sebuah organ eksekutif kecil, berfungsi secara kontinu dan dapat mengambil keputusan secara cepat dan efektif agar dapat melaksanakan perangkat pemaksaan (*enforcement machinery*) dari Bab II Charter manakala perdamaian dan keamanan internasional terancam. Barangkali ada benarnya bahwa Dewan Keamanan, dalam prakteknya tidak menjadi organ yang demikian.⁴⁴

Konferensi San Fransisco berhasil menyusun suatu piagam yang dikenal dengan nama *Charter For Peace* (Piagam Perdamaian). Isi pokok dari *Charter For Peace* adalah bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right of self determination*). Piagam inilah yang melandasi kegiatan dari organisasi internasional yang disebut sebagai PBB dan UNO. Istilah *United nations* pertama kali dipergunakan oleh Franklin Delano Roosevelt pada tanggal 1

⁴⁴ D.W Bowett Q.C.LL.D, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 34

Januari 1942. Baru pada tanggal 24 Oktober 1945, badan tersebut disahkan oleh sebagian besar negara peserta, sehingga tanggal 24 Oktober 1945 secara resmi diakui sebagai hari berdirinya PBB.

Hal tersebut juga diikuti dengan pembentukan beberapa badan-badan organisasi internasional seperti Dewan Keamanan (*Security Council*), Majelis Umum (*General Assembly*), *Secretariat*, *International Court of Justice*, *Economic and Social Council*, *Specialized Agencies* dan beberapa organisasi internasional PBB lainnya. Yang mana semua badan organisasi internasional tersebut mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Dewan Keamanan sendiri ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Jika organ-organ lain dan PBB hanya bisa membuat rekomendasi untuk pemerintahan negara anggota, maka Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintahan negara anggota sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan dengan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan mengadakan pertemuaan pertamanya pada tanggal 17 Januari 1949 di Church House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Keamanan telah berkedudukan tetap di Markas Besar PBB di New York. Keunikan utama dalam Dewan Keamanan PBB adalah hadirnya 2 macam keanggotaan, yaitu *Parmanent Members and Non-permanent Members*. Dewan ini mempunyai 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap sebagai berikut:

- a. Lima negara anggota tetap (*the Big Five*), kelima negara itu mempunyai hak veto. Hak veto yaitu hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan.

Table 1

Anggota Tetap Dewan Keamanan

Negara	Grup	Anggota sejak
Republik Rakyat Tiongkok	Group Asia-Pasifik	1971, menggantikan Republik Tiongkok
Perancis	Group Eropa Barat dan lainnya	1946
Rusia	Group Eropa Timur	1991, menggantikan Republik Sosialis Uni Soviet
Britania Raya	Group Eropa Barat dan lainnya	1946
Amerika Serikat	Eropa Barat dan Lainnya	1046

- b. Adapun negara tidak tetap (*non-permanent*) dalam Dewan Keamanan PBB, terdiri atas 10 negara. Rotasi akan dilakukan kembali ketika masa 2 tahun tersebut telah usai. Berikut negara-negara yang pernah menjabat dari 2011-2016:

Negara	Group	Awal Jabatan	Akhir Jabatan
Azerbaijan	Group Eropa Timur	2012	2013
Kolombia	Amerika Latin dan Karibia	2011	2012
Jerman	Group Eropa Barat dan lainnya	2011	2012
Guatemala	Amerika Latin dan Karibia	2012	2013
India	Group Asia-Pasifik	2011	2012
Maroko	Group Afrika (Representatif Arab)	2012	2013

Pakistan	Group Asia-Pasifik	2012	2013
Portugal	Group Eropa Barat dan lainnya	2011	2012
Afrika Selatan	Group Afrika	2011	2012
Togo	Group Afrika	2012	2013
Chad	Group Afrika	2014	2015
Chili	Group Amerika Latin	2014	2015
Lituania	Group Eropa Timur	2014	2015
Nigeria	Group Afrika	2014	2015
Yordania	Group Asia-Pasifik	2014	2015
Angola	Group Afrika	2015	2016
Malaysia	Group Asia-pasifik	2015	2016
Selandia Baru	Group Eropa Barat	2015	2016
Spanyol	Group Eropa Barat dan lainnya	2015	2016
Venezuela	Group Amerika Latin	2015	2016

Setiap tahun Majelis Umum memilih 5 anggota tidak tetap (dari 10 total) untuk jangka waktu dua tahun. 10 kursi non-permanen di distribusikan secara regional sebagai berikut: 5 untuk negara di Afrika dan Asia, satu untuk negara di Eropa Barat Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia, dan dua negara-negara di Eropa dan lainnya. Para kelompok regional dibentuk berdasarkan wilayah geografi. Kelompok Eropa Barat merupakan pengecualian karena kelompok ini juga mencakup negara-negara lain, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Presiden Dewan dipegang oleh setiap anggota pada gilirannya selama satu bulan. Peran seorang Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencakup penerapan agenda, pemimpin pertemuan-pertemuan dan mengawasi situasi krisis. Seorang Presiden berhak untuk mengeluarkan Pernyataan Presidensil (atas hasil konsensus antar anggota) dan catatan-catatan yang

dugunakan untuk menyatakan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Keamanan.

Dalam sidang Dewan Keamanan berlaku ketentuan bahwa setiap anggota mempunya 1 suara. Keputusan diambil berdasarkan sekurang-kurangnya 9 suara setuju dari 15 suara anggota. Untuk keputusan-keputusan yang penting berlaku pula ketentuan seperti tersebut diatas dengan catatan bahwa 9 suara termasuk suara setuju kelima anggota tetap. Kalau salah satu dari kalima anggota tetap tidak setuju, maka keputusan tidak dapat dibuat. Walaupun demikian, anggota tetap Dewan Keamanan tidak menggunakan hak veto dalam kondisi-kondisi krisis lainnya.⁴⁵

Dewan keamanan PBB dalam melakukan hal hal tertentu dapat melakukan persidangan di setiap waktu. Setiap dewan keamanan PBB dapat bersidang apabila:

- a. Atas permintaan anggota dewan keamanan PBB
- b. Atas permintaan majelis umum apabila terdapat suatu keadaan yang dapat mengancam perdamaian
- c. Permintaan sekretaris jenderal.

Setiap negara anggota PBB atau bukan PBB apabila terjadi masalah mengenai kepentingan dalam pertikaian tanpa hak suara dan tiap anggota PBB mempunyai suatu suara. Dalam pemungutan suara diperlukan hak veto dimana disini anggota tetap dewan keamanan PBB memberikan satu suara dan hak veto merupakan hak penuh bagi negara anggota tetap dewan keamanan PBB.

⁴⁵ Irma Suryani, *Op. cit*

Anggota dewan keamanan adalah negara negara yang memiliki hampir keseluruhan beban perang dunia karena itu sesudah perang kepada mereka diberikan peranan dalam sistem PBB untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Pemberian hak veto kepada kelima negara besar (Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Perancis, dan China) berdasarkan faktor faktor pertimbangan politis, seperti:

- a. Keputusan tentang adanya kebutuhan suatu badan yang keanggotaannya terbatas, sehingga mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat serta efisien atas masalah masalah yang timbul yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan atau ketertiban internasional.
- b. Secara politis kelima negara besar tersebut merupakan “*big powers*” dan dua diantaranya “*super powers*” dan kepada mereka terletak tanggung jawab keamanan dan ketertiban internasional.
- c. Negara negara anggota secara sukarela kelihatan menerima sistem ini, walaupun bertentangan dengan prinsip prinsip persamaan (*equality of states*) yang tertera dalam pasal 2 ayat 1 piagam PBB.

Dewan keamanan PBB dapat memutuskan tindakan tindakan yang dapat dilaksanakan (tanpa menggunakan senjata) untuk menyelesaikan serta melaksanakan keputusan. Tindakan tersebut dapat berupa:

- a. Meminta kepada negara negara anggota PBB melakukan blokade terhadap negara yang sedang konflik, seperti blokade ekonomi dan bisa melakukan pemutusan hubungan diplomatik.

- b. Mengirimkan anggota pasukan PBB ke negara yang sedang berkonflik.⁴⁶

Untuk membantu dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan memiliki kekuasaan untuk membentuk badan pendukung seperti:

1. Komite Kontra-Terrorisme

Komite Kontra-Terrorisme (CTC) didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001), yang diadopsi dengan suara bulat pada tanggal 28 September 2001 setelah terjadinya serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Tugas Komite ini adalah untuk membantu negara anggota PBB untuk mencegah tindakan teroris baik di dalam wilayah mereka dan antar wilayah.

CTC adalah sebuah komite yang mencakup keseluruhan 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Komite ini akan menjadi prioritas PBB dalam kontra-terorisme seperti yang digambarkan Koffi Annan sebagai pusat usaha global dalam melawan terorisme. Fungsi utama dari CTC adalah untuk memperkuat kapasitas kontra-terorisme dari negara anggota PBB. Misinya adalah untuk meningkatkan tingkat rata-rata performa pemerintahan melawan terorisme di seluruh dunia. Hal ini juga sebagai usaha untuk mengkoordinasikan upaya kontra-terorisme dari berbagai organisasi internasional, regional dan subregional baik didalam maupun di luar sistem PBB.⁴⁷

2. Komite Staf Militer

Komite Staf Militer adalah Dewan Keamanan PBB badan pendukung yang perannya, seperti yang di defenisikan dalam Piagam PBB, adalah untuk

⁴⁶ Narsif, *Hukum organisasi internasional*, Fakultas Hukum Padang, 2007, Hlm.63

⁴⁷ David Cortright, *A Critical Evolution of the UN Counter-Terrorism Program: Accomplishments and Challenges*, Transnational Institute, Amsterdam, 2005, hal. 11

merencanakan operasi militer PBB dan membantu dalam pengaturan persenjataan. Tujuan dari Komite Staf Militer dimaksudkan untuk memberikan staf komando untuk satu set angkatan udara kontingen. Kontingen ini disediakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan (Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat) yang disiapkan untuk penggunaan atas kebijaksanaan PBB.

3. Komite Sanksi

Komite Sanksi dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang memili sanksi terhadap keputusannya. Tugas Komite Sanksi adalah untuk memantau pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan dibentuk berdasarkan Resolusi 1970 (2011) tentang Libya. Komite Sanksi untuk Libya, menurut Resolusi 1970 (2011), harus memantau pelaksanaan sanksi, melaporkan Dewan Keamanan pada pekerjaan, dan memeriksa dan mengambil tindakan yang tepat terhadap informasi mengenai degaan pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan langkah-langkah yang diambil dalam resolusi ini.

4. Komite Tetap dan Komite Ad Hoc

Komite Tetap dan Komite Ad Hoc yang dibentuk sesuai nkebutuhan pada isu tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Anggota Baru dan Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Resolusi Konflik di Afrika. Komite Dewan Keamanan terntang Penerimaan Anggota Baru memberikan rekomondasi Kepada Majelis Umum dalam hal pendaftaran anggota baru PBB. Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Penyelesaian Konflik di Afrika memberikan rekomondasi mengenai peningkatan kerjasama

antar Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial serta dengan badan-badan PBB berurusan dengan Afrika, serta memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut.

5. Operasi Perdamaian

Operasi Perdamaian PBB memantau negara yang sedang berada dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan keamanan dan dukungan pembangunan politik, serta membantu negara-negara untuk mencapai perdamaian dalam masa-masa transisi yang sulit. Saat ini ada 15 operasi penjaga perdamaian, diantaranya *The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)*, *United Nations in the Republic of South Sudan (UNMISS)*, *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)*, and *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO)*.

6. Pengadilan Internasional

Dewan Keamanan PBB membentuk dua pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan selama perang, yaitu Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) adalah pengadilan PBB yang mengadili kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Balkan pada tahun 1990. Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) didirikan untuk penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda antara 1 Januari 1994 dan 31

Desember 1994. Pengadilan ini juga dapat menangani penuntutan warga Rwanda yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang dilakukan di wilayah Rwanda dan negara-negara di sekitar Rwanda selama periode yang sama.

7. Komisi Pembangunan Perdamaian

Komisi Pembangunan Perdamaian adalah satu-satunya badan penasehat Dewan Kemanan PBB. Komisi ini adalah sebuah badan penasehat antar pemerintahan yang mendukung upaya perdamaian negara-negara berkembang yang berada dalam konflik, dan merupakan tambahan kunci untuk kapasitas Masyarakat Internasional dalam agenda perdamaian yang luas. Komisi Pembangunan Perdamaian berperan dalam: (1) Menyatukan semua aktor yang relevan, termasuk lembaga donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintahan nasional, dan negara yang menyumbangkan pasukan, (2) sumber daya militer dan (3) memberi saran dan mengusulkan strategi terpadu untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik dan pemulihan jika perlu, menyoroti setiap celah yang mengancam untuk merusak perdamaian. Burundi, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, dan Republik Afrika Tengah adalah negara negara yang saat ini dalam agenda Komisi Pembangunan Perdamaian.⁴⁸

⁴⁸ Safril Djmain, *Mengenal Lebih Jauh PBB dan Negara-negara di Dunia*, PT Intan Pariwara, Jakarta, 1993, hlm. 20

C. Sejarah dan Perkembangan Konflik Palestina dan Israel

Sejarah dan perkembangan konflik antara Palestina dan Israel bisa ditarik mundur sejak tahun 2000 SM. Namun dalam sejarah kontemporer, konflik Palestina-Israel dimulai pada tahun 1967 ketika Israel menyerang Mesir, Yordania dan Syria dan berhasil merebut Sinai dan Jalur Gaza (Mesir), dataran tinggi Golan (Syria), Tepi Barat dan Yerusalem (Yordania). Sampai sekarang perdamaian sepertinya jauh dari harapan. Ditambah lagi terjadi ketidak sepakatan tentang masa depan Palestina dan hubungannya dengan Israel di antara faksi-faksi di Palestina sendiri.

Al-Quran Al-Karim telah menceritakan semua atau sebagian besar dari para Nabi Bani Israel. Mereka telah dilukiskan dalam perspektif yang paling mulia, sesuai dengan undang-undang Ilahi dalam memilih Rasul-rasul-Nya. Perspektif ini telah diabadikan dalam firman-Nya sebagai berikut:

“Allah memilih utusan-utusan(Nya) dari malaikat dan dari manusia”. (QS. Al-Hajj: 75).

Sebenarnya semua Nabi Bani Israel adalah orang-orang pilihan yang berbudi mulia, sebagaimana para Nabi yang lainnya. Dalam memperbincangkan tentang sifat-sifat para Rasul, para filosof Islam telah menempatkan mereka pada tempatnya yang proporsional, fitri dan tinggi. Mereka (para Rasul) itu mempunyai sifat-sifat: fathanah (kecerdasan akal), sidik (benar dalam tutur katanya), amanah (dapat dipercaya) dalam menyampaikan seruan Allah (tabligh), suci dari sifat-sifat yang akan mencemarkan kerasulannya serta mewajibkan atas manusia agar

mempercayai bahwa jiwa para Rasul itu senantiasa menerima bantuan Allah, tidak ada kemungkinan bagi jiwa seseorang untuk dapat melebihi kerohanian mereka.

Oleh karena itu, bahan-bahan pembahasan tentang para Nabi Israel itu akan disuntingkan dari Al-Quran al-Karim, dari tafsir-tafsir dan dari uraian-uraian yang ditulis oleh orang-orang Islam yang menempatkan para Nabi di dalam suatu lingkungan yang diliputi dengan sifat-sifat keutamaan dan kesucian.

Perkembangan sejarah Bani Israel yang bergolak itu dimulai sejak zaman Nabi Musa. Sebenarnya kita bisa memulai pembahasan dari zaman itu, tetapi nampaknya ada baiknya jika kita mulai saja dengan agak sedikit surut ke belakang, yakni dari sejak sebelum zaman Nabi Musa. Disini akan membicarakan masing-masing para Nabi di antara mereka itu dari segi-segi pemikiran dan budi pekerti berdasarkan ayat-ayat Al-Quran.⁴⁹

a. Periode Nabi Ibrahim

Para sejarawan memperkirakan Nabi Ibrahim hidup antara tahun 1700-2000. Nabi Ibrahim berasal dari keturunan Sam bin Nuh. Ibrahim adalah salah seorang Nabi Ulul Azmi. Allah mengutusnyanya kepada kaumnya agar dia menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah. Ibrahim melakukan dialog terbuka dengan raja mereka, Namrud. Seorang raja congkak dan sombong serta mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Setelah demikian panjang perjuangan yang Nabi Ibrahim lakukan terhadap kaumnya, tidak ada seorang pun yang beriman pada ajakan dan

⁴⁹ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama: Agama Yahudi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 111-115

seruan dakwahnya kecuali istrinya yang bernama Sarah dan sepupunya Luth. Maka, merekapun hijrah ke negeri Syam.

b. Periode Nabi Ismail dan Nabi Ishak

Nabi Ibrahim kembali ke Khalil di Syam dan tinggal disana. Sarah, istrinya memberikan Hajar pada Ibrahim untuk dinikahi. Sarah berkata, “semoga Allah mengaruniakan sorang anak darinya.” Maka, setelah beberapa lama menikah, Hajar hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Namun, Sarah dilanda cemburu yang sangat kuat dan meminta kepada Ibrahim agar Hajar bersama anak yang baru dilahirkan itu pergi dari sisinya. Ibrahim bersama Hajar dan anaknya segera berangkat ke arah selatan hingga tiba di sebuah tempat yang disebut Mekkah al-Mukarramah. Kemudian dia tinggalkan keduanya ditempat itu dan Ibrahim kembali ke Syam.

Ishaq adalah putra Nabi Ibrahim dan ibunya adalah Sarah. Dia tumbuh dan berkembang di kota al-Khalil. Dia dikarunia anak yang bernama ya'qub yang tak lain adalah Israel. Nabi Ishaq hidup sepanjang 180 tahun dan meneruskan dakwah ayahnya setelah ayahnya meninggal.⁵⁰

c. Periode Nabi Ya'kub dan Nabi Yusuf

Ya'qub melakukan migrasi ke Haran wilayah Syam utara dn kawin di sana. Allah mengaruniakan dua belas anak padanya. Diantaranya adalah Yusuf dan

⁵⁰ Ahmad al-Uswairy, *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam hingga Abad XX*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2003, hlm. 26-27

Bunyamin (dua orang bersaudara seayah seibu). Ya'qub meneruskan dakwah ayahnya dan kakeknya, Ishaq dan Ibrahim. Yakni, mengajak manusia untuk senantiasa menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Dia hidup selama 147 tahun.

Ada kisah yang demikian masyhur yang terjadi pada Yusuf. Ringkasannya demikian, saudara-saudaranya sangat iri kepada Yusuf karena ayah mereka lebih mencintai Yusuf ketimbang diri mereka. Maka, mereka pun merencanakan untuk melepaskan diri dan menyingkirkan Yusuf. Ayahnya membiar Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya setelah adanya permintaan yang gencar dan terus-menerus dari mereka. Lalu, merekapun keluar membawa Yusuf yang kemudian dilemparkannya ke dalam sebuah sumur.

Kemudian mereka kembali dan menemui ayah mereka sambil berpura-pura menangis. Mereka mengatakan bahwa serigala telah menerkam adik mereka. Saat itu adalah kafilah yang berasal dari Syam menuju Mesir. Mereka mengeluarkan Yusuf dari sumur dan membawanya ke Mesir. Penguasa Mesir membeli Yusuf dari tangan kafilah itu yang kemudian memeliharanya dengan sebaik-baiknya.

Penguasa melihat bahwa Yusuf memiliki kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Makanya, dia ditempatkan dalam bagian logistik dan ekspor barang. Yusuf menjual gandum ke negeri-negeri tetangganya yang dilanda kekeringan dan paceklik. Ini semua menunjukkan bahwa Mesir saat itu berada dalam kondisi makmur.

Merekapun kembali ke Mesir dan akhirnya mengenali Yusuf. Yusuf memaafkan apa yang mereka lakukan dan meminta mereka untuk kembali ke Syam dan datang kembali ke Mesir dengan membawa semua anggota keluarga mereka. Mereka pun melakukan apa yang diminta Yusuf.

Demikian Bani Israel pindah ke Mesir. Jumlah mereka tidak lebih dari 100 orang. Mereka tinggal di Mesir selama 500 tahun. Kemudian mereka meninggalkan Mesir bersama-sama dengan jumlah lebih dari 1.600 laki-laki selain kaum wanita. Populasi anak keturunan Israel (Nabi Ya'qub) membesar.

Terjadi migrasi besar-besaran ke negeri Syam dan Irak dan Jazirah Arab. Orang-orang yang melakukan migrasi ini terpencar ke beberapa wilayah yang subur. Maka, berdirilah kerajaan Amuruyah di wilayah bagian utara, dan kerajaan Vinicea ditepian pantai Laut Tengah. Sedangkan, pemerintahan Kan'an berdiri pula di Palestina dan sekitarnya.⁵¹

Orang-orang Kana'an, penduduk Kana'an (Palestina), juga adalah suku amaliqah. Mereka telah bermukim di Palestina semejak zaman yang lama, yaitu kira-kira 2500 tahun SM. Orang-orang Kana'an ini tidak dapat mendirikan suatu negara kesatuan, yakni suatu kerajaan yang kuat yang dapat mempersatukan mereka di bawah panji-panji kekuasaannya. Mereka hanya dapat mendirikan kerajaan-kerajaan atau negara-negara kecil yang terdiri dari kota-kota, antara lain

⁵¹ Ahmad al-Usuairy, *Op. Cit*, hlm. 32-38

kota Betshean, Megiddo, Ariha (Jericho) dan Al-Quds. Ada kira-kira 35 kerajaan kecil mereka didirikan di Palestina itu.⁵²

d. Periode Nabi Musa dan Nabi Harun

Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun banyak di ulang-ulang dalam Al-Quran Al-Karim, tidak seperti kisah nabi-nabi yang lain.

Musa sendiri banyak terkena penganiayaan dari orang-orang Bani Israel. Beberapa tuduhan-tuduhan jahat dilemparkan kepadanya untuk mempermalukannya. Tetapi dengan tegas Al-Quran Al-Karim telah menolak semua tuduhan itu dan membela Nabi Musa dengan memberikan bukti-bukti kesuciannya. Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah”. (QS. Al-Ahzab: 69).

Politik di Mesir berubah. Bangsa Israel dianggap sebagai masalah bagi negara Mesir. Banyak dari bangsa Israel yang lebih pintar dari orang asli Mesir dan menguasai perekonomian. Oleh pemerintah Fir'aun bangsa Israel diturunkan statusnya menjadi budak. Kekejaman dan kezaliman Fir'aun semakin meningkat

⁵² Mukhtar Yahya, *Perpindahan-perpindahan Kekuasaan di Timur Tengah Sebelum dan di Saat Lahir Aga Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985, hal. 44

dan menjadi-jadi. Maka, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk hijrah bersama kaumnya ke Syam.⁵³

Setelah itu orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi Musa untuk menurunkan makanan. Lalu, Allah menurunkan kepada mereka manna dan salwa. Nabi Musa melanjutkan perjalanan bersama mereka hingga sampai ke wilayah pegunungan Sinai.⁵⁴

e. Periode Nabi Daud

Dalam pribadi Nabi Daud terkumpul dua keutamaan besar, yaitu kenabian dan kerajaan. Allah SWT telah memberikan karunia dengan sebesar-besar nikmatnya dan telah memberikan keutamaan dengan setinggi-tinggi taufik-Nya kepada beliau.

Terjadilah pertempuran antara Bani Israel dan kaum Amaliqah yang dipimpin oleh Jalut. Pertempuran itu terjadi di Marj al-Shifr (wilayah selatan Damaskus). Daud berhasil membunuh Jalut yang sombong hanya dengan menggunakan batu dan katapel. Saat itu Daud hanyalah seorang anak baru dewasa yang ikut dalam pasukan Thalut. Nabi Daut demikian terkenal di tengah kaumnya. Sedangkan, Thalut telah menjanjikan bagi siapa saja yang berhasil membunuh Jalut akan memberikan separuh dari kerajaannya dan akan mengawinkan dengan anak wanitanya. Oleh sebab itulah, dia terpaksa turun tahta kekuasaannya dan mengawinkan anaknya dengan Daud.

⁵³ Ahmad Shalaby, *Op. cit*

⁵⁴ Ahmad al-Usuairy, *Op. cit*, hlm. 56-57

f. Periode Nabi Sulaiman

Nabi Sulaiman telah mewarisi kerajaan orang tuanya, Nabi Daud, ditambah lagi Allah telah memberikan karunia-Nya yang amat banyak serta berbagai macam kenikmatan yang menakjubkan.

Nabi Sulaiman A.s. melanjutkan jihad ayahnya sampai ke Damaskus. Dia berhasil menaklukkan Yaman dan menjadikan orang-orang Saba' bertekuk lutut dihadapannya. Dia menikah dengan ratu mereka yang bernama Bilqis sebagai penguasa Yaman yang tetap tunduk dibawah kekuasaannya. Di antara yang dilakukan Sulaiman adalah merehabilitasi dan merenovasi Masjidil Aqsha sebelumnya pernah dibangun oleh Ya'kub atau ayahnya Ishaq empat puluh tahun setelah dibangunnya Ka'bah.

Sulaiman bertahta di singgasana kerajaan selama 20 tahun dengan senantiasa menegakkan syariah Allah di muka bumi. Setelah wafat dia digantikan oleh anaknya yang bernama Rahba'am. Sepeninggalannya, keadaan Bani Israel semakin melemah dan kerusakan yang mereka lakukan semakin bertambah. Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut, hingga akhirnya kerajaan itu terbelah menjadi dua, yakni bagian Utara bernama Israel beribukota Samaria dan Selatan bernama Yehuda beribukota Yerusalem.⁵⁵

Itulah para Nabi Bani Israel yang dikisahkan oleh Al-Quran Al-Karim. Mereka adalah pesuruh Allah yang terpilih. Mereka adalah juru dakwah yang lurus tingkah lakunya. Mereka diutus semata-mata untuk menghapus bencana dan

⁵⁵ [http://www.riapos.co/3256-berita-sejarah-konflik-palestina%E2%80%93israel-\(bagian-1\).html](http://www.riapos.co/3256-berita-sejarah-konflik-palestina%E2%80%93israel-(bagian-1).html) diakses pada tanggaln 7 Mei 2017

kejahatan dari kaumnya, agar mereka dapat dipimpin ke jalan yang benar. Akan tetapi kaum Bani Israel itu adalah manusia yang berhati batu, sulit menerima petunjuk yang baik bahkan tidak mau menerima petunjuk itu. Kesudahannya, mereka telah menyimpang dari jalan yang lurus dan sesat. Mereka justru memenuhi di atas permukaan bumi ini dengan pendurhakaan dan berbagai macam perbuatan durjana, sebagaimana yang telah kita lihat dalam lembaran-lembaran terdahulu dan juga pada lembaran-lembaran yang akan datang nanti.

g. Periode Tahun 922 SM – 190 SM

Sepeninggal Sulaiman Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut, hingga akhirnya kerajaan itu terbelah menjadi dua, yakni bagian Utara bernama Israel beribukota Samaria dan Selatan bernama Yehuda beribukota Yerusalem.⁵⁶

Pada Tahun 600-500 SM, Kerajaan Yehuda dihancurkan lewat tangan Nebukadnezar dari Babiloni, Nebukadnezer putra dari Nebopalsasar, seorang panglima Assyria yang bertugas di babilonia sebagai Gubernur dari Kemaharajaan Assyria itu dan meninggal tahun 605 SM. Sementara itu di negara Yahuda mengalami kekacauan dan kejahatan bersimahrajalela, sebagai akibat dari perilaku membelakangi akidah Tauhid dan menggantikannya dengan penyembahan berhala dan melanggar perintah-perintah Yehova (Allah SWT). Orang-orang bangsawan dan orang-orang terkemuka Yahuda banyak yang di bawa ke Babilonia oleh

⁵⁶ Riaupos, *loc cit.*

Nebukadnezar sebagai tawanan. Diantaranya terdapat Nabi Daniel.⁵⁷ Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 605 SM.

Adapun Jerusalem sendiri, oleh Nebukadnezar kota ini hancurkan, diratakannya dengan tanah. Pagar temboknya dibakarnya. Haikal Sulaiman pun dihancurkan. Enam puluh orang dari orang-orang Yahuda yang terkemuka dibunuh. Selebihnya dibawa ke Babilonia sebagai orang-orang tawanan, maka tidak ada yang tinggal di Jerusalem lagi, kecuali orang-orang yang dipandang rendah, perampok-perampok, pengacau-pengacau dan sebagainya. Dengan jatuhnya Jerusalem robohlah Kerajaan Yahuda dan berpindahlah kekuasaan Jerusalem Selatan dari tangan Bani Israel (orang-orang Yahuda) ketangan bangsa Babilonia.⁵⁸

Pada tahun 500-400 SM, maka takkala Cyrus Agung menyerang Babilonia, orang-orang Yahuda mendapat peluang emas. Mereka mendukung, membantu dan mengelu-elukan kedatangan tentara Persia itu. Oleh Cyrus, budi dan jasa baik mereka dibalas. Mereka dipulangkan ke Jerusalem dan diperintahkan memabngunkembali Haikal Sulaiman yang telah diporak-porandakan oleh Nebukadnezar. Dengan demikian kembalilah mereka beramai-ramai ke tanah air mereka. Cyrus dapat merebut kota Babilonia itu pada tahun 538 SM. Cyrus Persia meruntuhkan Babylonia dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Cyrus berasal dari daerah Paristan (Persis), yaitu suatu daerah pegunungan di Persia yang terletak di sebelah Selatan daerah Media, dan meninjau ke Teluk

⁵⁷ Nabi Daniel inilah yang kemudian menerangkan kepada Nebukadnezar arti mimpi-mimpinya yang ajaib.

⁵⁸ Mukhtar Yahya, *Op. cit*, hlm. 304-310

Persia. Luasnya lebih kurang 200.000 mil. Dari daerah inilah munculnya raja-raja Persia yang perkasa-perkasa itu. Bumi Paristan ini separuhnya terdiri dari padang pasir yang gersang dan separuhnya yang lain daerah pantai dan lembah-lembah yang diapit oleh gunung-gunung.⁵⁹

Pada tahun 330-190 SM, Israel diduduki Iskandar Agung dari kerajaan Macedonia di Yunani. Ia melakukan Hellenisasi (suatu perpaduan antara kebudayaan Yunani dengan kebudayaan daerah-daerah) terhadap bangsa-bangsa taklukannya. Bahasa Yunani menjadi bahasa resmi Israel, sehingga nantinya Injil pun ditulis dalam bahasa Yunani dan bukan dalam bahasa Ibrani.⁶⁰

Pompey (Pompeius) Agung panglima Romawi yang dikala itu berada di Suriah, tentu saja tidak akan menyia-nyiakan peluang keemasan.⁶¹ Maka datanglah dia ke Jerusalem, lengkap dengan bala-tentaranya. Akan tetapi dia datang bukanlah untuk mendamaikan kedua golongan yang berebut kekuasaan di Palestina itu, atau untuk mendukung salah satu golongan di antara kedua golongan itu, melainkan untuk mengepung Jerusalem dan mendudukinya, kemudian memasukkan Palestina ke bawah kekuasaan Kemaharajaan Romawi.

Dengan demikian lenyaplah kembali kemerdekaan bangsa Yahudi yang telah mereka rebut dari tangan Kemaharajaan Saluqiyah, dan berpindahlah

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 348

⁶⁰ Riaupos, *Op. cit*

⁶¹ Pompey Agung pada tahun 64 SM berhasil menumbangkan Antiochus XIII raja Kemaharajaan Saluqiyah yang terakhir. Dengan demikian berakhirlah riwayatnya Kemaharajaan Saluqiyah itu, setelah menguasai daerah yang demikian luasnya dalam masa 24 tahun (312-64 SM). Maka oleh Pompey dijadikanlah negeri Syam (Suriah) sebagai suatu wilayah dari Kemaharajaan Romawi.

kekuasaan di Palestina dari tangan bangsa Romawi dan jatuhnya Palestina ke bawah kekuasaan bangsa Romawi.⁶²

h. Periode Tahun 1 – 638 M

Nabi Isa (Yesus) lahir, kemudian menjadi pemimpin gerakan melawan penguasa Romawi. Namun selain dianggap subversi oleh penguasa Romawi (dengan ancaman hukuman tertinggi yakni dihukum mati di kayu salib), ajaran Yesus sendiri ditolak oleh para Rabbi Yahudi. Namun setelah Isa tiada, bangsa Yahudi memberontak terhadap Romawi.

Pada tahun 100-300 M Pemberontakan berulang. Akibatnya Palestina dihancurkan dan dijadikan area bebas Yahudi. Mereka dideportasi keluar Palestina dan terdiaspora ke segala penjuru imperium Romawi. Namun demikian tetap ada sejumlah kecil pemeluk Yahudi yang tetap bertahan di Palestina. Dengan masuknya Islam kemudian, serta dipakainya bahasa Arab di dalam kehidupan sehari-hari, mereka lambat laun terarabisasi atau bahkan masuk Islam.⁶³

Bulan Mei 30 M terjadi perpecahan dalam Kerajaan Romawi yang berpusat di Roma, yaitu pecah menjadi dua kerajaan; Kerajaan Romawi Barat (Roma) dan Kerajaan Romawi Timur, dengan ibukota Konstatinopel, dan Konstantinus Agung (Kaisar Contantin) sebagai maharajanya. Negeri-negeri yang berada di bawah

⁶² Mukhtar Yahya, *Op. cit.*, hlm. 334

⁶³ Riaupos, *loc cit.*

kekuasaan Kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani, yang pada waktu itu terpecah dalam beberapa aliran.⁶⁴

Pada tahun 621 M, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan rohani Isra' dari masjidil Haram di Makkah ke masjidil Aqsa di Palestina dilanjutkan perjalanan Mi'raj ke Sidrathul Muntaha (langit lapis ke-7). Rasulullah menetapkan Yerusalem sebagai kota suci ke-3 umat Islam, dimana sholat di masjidil Aqsa dinilai 500 kali dibanding sholat di masjid lain selain masjidil Haram di Makkah dan masjid Nabawi di Madinah. Masjidil Aqsa juga menjadi kiblat umat Islam sebelum dipindah arahnya ke Ka'bah di masjidil Haram, Makkah.⁶⁵

Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan pendirian negara Islam yang selanjutnya disebut khilafah. Pada bulan Zulqaidah tahun 6 H, bertepatan dengan Februari tahun 628 M. Terjadilah "Perdamaian Hudaibiyah". Perdamaian Hudaibiyah ini memberi kesan kepada kaum Musyrikin Quraisy bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah musuh. Bahkan sadarlah mereka bahwa beliau adalah seorang manusia yang berbudi pekerti luhur, seorang saudara mereka yang tidak melupakan silaturahmi.

Pada tahun (8 H, 629 M) terjadi suatu peristiwa yang besar akibatnya, yaitu kaum Musyrikin Quraisy melanggar suatu syarat Perjanjian Hudaibiyah. Perbuatan kaum Quraisy ini membawa akibat besar, yaitu Nabi tidak terikat lagi

⁶⁴ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradapan Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 48

⁶⁵ Riaupos, *loc cit.*

dengan perjanjian Hudaibiyah itu, maka terbukalah jalan bagi beliau untuk menaklukkan kota Makkah.

Maka bulan Ramadhan tahun 8 H (Januari 630 M), Nabi dengan suatu pasukan terdiri dari sepuluh ribu kaum Muslimin berangkat dari Madina untuk menaklukkan kota Makkah. Akhirnya kota ini dapat ditaklukkan, tanpa perlawanan yang berarti dari kaum Musyrikin, bahkan tanpa peperangan, karena Nabi Muhammad SAW sendiripun tak ada memerintahkan untuk memerangi kaum Musyrikin Makkah itu.⁶⁶

Di bawah pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Khattab ra. Seluruh Palestina dimerdekakan dari penjajah Romawi. Seterusnya seluruh penduduk Palestina, Muslim maupun Non Muslim, hidup aman di bawah pemerintahan khilafah. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya.

Di zaman Umar gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama terjadi, ibu kota Syria, Damaskus, jatuh 635 M dan setahu kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan 'Amr ibn 'Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqah. Iskandaria, ibu kota Mesir, ditaklukkan tahun 641 M. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiya, sebuah kota dekat Hirah di Iraq, jatuh pada tahun 637 M. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada

⁶⁶ Mukhtar Yahya, *Op.cit.* hlm.252

tahun 641 M, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia, dan Mesir.⁶⁷

i. Periode Tahun 1076-1967

Yerusalem dikepung oleh tentara Salib dari Eropa. Karena pengkhianatan kaum munafik (sekte Drusiah yang mengaku Islam tetapi ajarannya sesat), pada tahun 1099 M tentara salib berhasil menguasai Yerusalem dan mengangkat seorang raja Kristen. Penjajahan ini berlangsung hingga 1187 M sampai Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya dan setelah itu ummat Islam yang terlena sufisme yang sesat bisa dibangkitkan kembali.⁶⁸

Semula tentara Salib datang ke Tanah Suci dengan anggapan bahwa derajat mereka jauh lebih tinggi dari rakyat setempat dan memandangnya sebagai orang-orang penyembah berhala yang memuja Muhammad sebagai Tuhan. Tetapi setelah berhadapan untuk pertama kali ternyata kebalikannya yang mereka temui. Mereka menyaksikan betapa maju dan makmurnya negeri Timur. Setelah penyerbuan selesai dan dalam waktu dua abad mereka hidup hidup di daerah itu, mereka mulai menyesuaikan diri.⁶⁹

Pada tahun 1835, sekelompok Yahudi membeli tanah di Palestina, dan lalu mendirikan sekolah Yahudi pertama di sana. Sponsornya adalah milyuder Yahudi

⁶⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 37

⁶⁸ Riaupos, *loc cit.*

⁶⁹ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengatahuan Islam*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 234

di Inggris, Sir Moshe Monteveury, anggota Free Masonry. Ini adalah pertama kalinya sekolah ber kurikulum asing di wilayah Khilafah. Inggris membuka konsulat di Yerusalem yang merupakan perwakilan Eropa pertama di Palestina.⁷⁰

15 Mei 1948, warga imigran Yahudi dengan paksa mendeklarasikan keberadaan negara Israel. Deklarasi ini terjadi hanya dalam hitungan jam setelah kerajaan negara Inggris menyatakan melepas Palestina, perang pun pecah. Tentara Zionis yang dari awal memang sudah dirancang memiliki persenjataan yang lengkap berhasil mengusir tak kurang dari 160.000 warga Palestina dari tanahnya sendiri. Setelah itu, Zionis Israel menguasai 77.4% dari keseluruhan tanah di Palestina. Imigran Yahudi dari segala penjuru bumi datang untuk menepati tanah yang sudah dijanjikan. Pada tahun 1949 strategi yang dijalankan oleh kelompok Zionis Israel membagi wilayah kekuasaan Palestina menjadi dua bagian, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dua daerah yang didukung dua pemerintahan terpisah. Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur didukung oleh pemerintahan Yordania, sedangkan Jalur Gaza didukung oleh pemerintahan Mesir.⁷¹

Pada tahun 1891, Para penduduk Palestina mengirim petisi ke Khalifah, menuntut dilarangnya imigrasi besar-besaran ras Yahudi ke Palestina. Sayangnya saat itu khilafah sudah “sakit-sakitan” (dijuluki “the sick man at Bosphorus”). Dekadensi pemikiran meluas, walau Sultan Abdul Hamid sempat membuat terobosan dengan memodernisir infrastruktur, termasuk memasang jalur kereta api dari Damaskus ke Madinah via Palestina. Sultan Abdul Hamid dipecat oleh Syaikhul Islam

⁷⁰ Riaupos, *loc cit.*

⁷¹ Herry Nurdi, *Jejak Darah Kaum Laknat, Manjala islam sabili: membongkar Rencana Besar Israel Raya*, artikel pada Sabili Edisi No 16 TH. XVI 26 Februari 2009, hal. 46-47

(Hakim Agung) yang telah dipegaruhi oleh Inggris. Perang Dunia I meletus, dan jalur kereta tersebut dihancurkan.⁷²

Pasca Perang Dunia I, Inggris berhasil menguasai Palestina dengan mudah. Orang-orang keturunan Yahudi yang mendominasi pemerintahan di Inggris kemudian mendukung gagasan Theodore Herzl yang sempat berhenti. Pemerintahan Inggris kemudian membantu mewujudkan pembentukan negara Israel di bumi Palestina. Awalnya, Herzl memang memang tidak menentukan dimana *father land* negara haram ini. Binsker, seorang penulis keturunan Yahudi di Rusia, mengusulkan tempat strategis pendirian negara di Amerika atau Afrika Selatan. Namun, mayoritas zionis Israel menginginkan Palestina menjadi tanah impiannya.

Menurut Z. A. Maulani, orang yang pertama kali menggagas negara Yahudi di Palestina adalah Yahuda al-Kalai (1798-1878) yang kemudian didukung oleh Izvi Hirsch Kalischer (1795-1874). Dalam buku *Derishat Zion* (1826), Izvi Hirsch Kalischer memaparkan pendapatnya tentang kemungkinan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Kaum Zionis pun memanfaatkan mitos-mitos Yahudi dan Holocaust untuk mewujudkan cita-cita Theodore Herzl membentuk negara Israel di Palestina. Setelah Deklarasi Balfour pada 2 November 1917, gerakan zionisme mulai mendorong migrasi kaum Yahudi ke tanah Palestina. Konferensi Zionisme Internasional pertama di Basel pada tahun 1897 memutuskan kebijakan migrasi secara besar-besaran ke tanah Palestina dan sekaligus menguasainya.

⁷² Riaupos, *loc cit.*

Ada dua peristiwa sejarah penting yang menjadi fondasi bagi berdirinya negara Yahudi di tanah Palestina. Pertama, perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 antara Inggris dan Perancis, yang membagi peninggalan Dinasti Utsmani di wilayah Arab. Pada perjanjian tersebut ditegaskan, Perancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Libanon, sedang Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Yordania. Sementara Palestina dijadikan status wilayah internasional. Kedua, Deklarasi Balfour tahun 1917, yang menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina pada gerakan zionisme. Di bawah payung legitimasi perjanjian Sykes-Picot dan Deklarasi Balfour tersebut, warga Yahudi di Eropa mulai melakukan imigrasi ke tanah Palestina pada tahun 1918. Akan tetapi, kemudian zionisme, menjelma menjadi sebuah gerakan kolonialisme yang sarat dengan praktik rasisme terhadap penduduk asli Arab di tanah Palestina.⁷³

Pada tahun 1917-1944, Menlu Inggris keturunan Yahudi, Arthur James Balfour, dalam deklarasi Balfour memberitahu pemimpin Zionis Inggris, Lord Rothschild, bahwa Inggris akan memperkokoh pemukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi. Lima tahun kemudian Liga Bangsa-bangsa (cikal bakal PBB) memberi mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina.

Nazi Jerman menganggap bahwa pengkhianatan Yahudi Jerman adalah biang keladi kekalahan mereka pada PD I yang telah menghancurkan ekonomi Jerman. Maka mereka perlu “penyelesaian terakhir” (endivsung). Ratusan ribu

⁷³ Adhes Satria, *Mengikat Janji Kaum Penghianat, Manjala islam sabili: membongkar Rencana Besar Israel Raya*, artikel pada Sabili Edisi No 16 TH. XVI 26 Februari 2009, hal. 40-45

keturunan Yahudi dikirim ke kamp konsentrasi atau lari ke luar negeri (terutama ke AS). Sebenarnya ada etnis lain serta kaum intelektual yang berbeda politik dengan Nazi yang bernasib sama, namun setelah PD II Yahudi lebih berhasil menjual ceritanya karena menguasai banyak surat kabar atau kantor-kantor berita di dunia.

Pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum habisnya perwalian Inggris di Palestina, para pemukim Yahudi memproklamkan kemerdekaan negara Israel. Mereka melakukan agresi bersenjata terhadap rakyat Palestina yang masih lemah, hingga jutaan dari mereka terpaksa mengungsi ke Libanon, Yordania, Syria, Mesir dan lain-lain. Palestina Refugees menjadi tema dunia. Namun mereka menolak eksistensi Palestina dan menganggap mereka telah memajukan areal yang semula kosong dan terbelakang. Timbullah perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya. Namun karena para pemimpin Arab sebenarnya ada di bawah pengaruh Inggris – lihat Imperialisme Perancis dan Inggris di tanah Arab sejak tahun 1798 – maka Israel mudah merebut daerah Arab Palestina yang telah ditetapkan PBB.⁷⁴

Ketika negara Israel berdiri tanggal 14 Mei 1948, berdasarkan perjanjian Bolfour yang disponsori oleh Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1947 telah merencanakan berdirinya negara-negara Palestina dan Yahudi. Resolusi PBB Nomor 181 tahun 1947 nyata-nyata telah mebagi tanah Palestina ke dalam dua negaram yakni negara Yahudi dan Arab. Lalu disusul oleh Deklarasi

⁷⁴ Riaupos, *loc cit.*

negara Israel pada bulan Mei 1948. Ada kezaliman dan ketidakadilan yang dirasakan oleh bangsa Arab menyangkut proses bercokolnya kaum Yahudi sejak tahun 1918 hingga deklarasi negara Israel tahun 1948. Hal tersebut telah mengobarkan Perang Arab-Israel pertama tahun 1948, dilanjutkan Perang Enam Hari tahun 1967.⁷⁵

Pada tanggal 2 Desember 1948, protes keras Liga Arab atas tindakan Amerika Serikat dan sekutunya berupa dorongan dan fasilitas yang mereka berikan bagi imigrasi zionis ke Palestina. Pada waktu itu, Ikhwanul Muslimin (IM) di bawah Hasan Al-Banna mengirim 10.000 mujahidin untuk berjihad melawan Israel. Usaha ini kandas bukan karena mereka dikalahkan Israel, namun karena Raja Farouk yang korup dari Mesir takut bahwa di dalam negeri IM bisa melakukan kudeta, akibatnya tokoh-tokoh IM dipenjara atau dihukum mati.

Perang besar terjadi lagi pada bulan Juni 1967. Zionis Israel mencoba mencaplok dua daerah penting, Sinai dan dataran tinggi Golan. Tahun itu, tanah bangsa Arab yang dirampas mencapai 89.359 kilometer persegi, empat kali lipat dari tanah yang dikuasai sebelum perang terjadi. Pasca perang tahun 1967, tercatat sebanyak 410.000 warga Palestina dipaksa meninggalkan tanahnya. Mereka menghindari pembantaian massal yang sering dilakukan kaum Zionis Israel. Kolonialisasi yang dilakukan Zionis terhadap dua wilayah Palestina, Tepi Barat

⁷⁵ Adhes Satria, *Op. cit*

dan Jalur Gaza awalnya adalah sebuah proyek bernama *Kfar Atssion*. Proyek ini pula yang akhirnya memisahkan rakyat Palestina di dua wilayah yang terpisah.⁷⁶

Pada November tahun 1967, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 242, untuk perintah penarikan mundur Israel dari wilayah yang direbutnya dalam perang 6 hari, pengakuan semua negara di kawasan itu, dan penyelesaian secara adil masalah pengungsi Palestina.

j. Periode Tahun 1973-1993

Pada tanggal 6 Oktober 1973, Mesir dan Syria menyerang pasukan Israel di Sinai dan dataran tinggi Golan pada hari puasanya Yahudi Yom Kippur. Pertempuran ini dikenal dengan Perang Oktober. Mesir dan Syria hampir menang, kalau Israel tidak tiba-tiba dibantu oleh AS. Presiden Mesir Anwar Sadat terpaksa berkompromi, karena dia cuma siap untuk melawan Israel, namun tidak siap berhadapan dengan AS. Arab membalas kekalahan itu dengan menutup keran minyak. Akibatnya harga minyak melonjak pesat. 22 Oktober, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Nomor 338, untuk gencatan senjata, pelaksanaan resolusi Nomor 242 dan perundingan damai di Timur Tengah.

Pertimbangan ekonomi (perang telah memboroskan kas negara) membuat Anwar Sadat pergi ke Israel tanpa konsultasi dengan Liga Arab. Ia menawarkan perdamaian, jika Israel mengembalikan seluruh Sinai. Negara-negara Arab merasa

⁷⁶ *Ibid*,

dikhianati. Karena langkah politiknya ini, belakangan Anwar Sadat dibunuh pada tahun 1982.

Pada September 1978, Mesir dan Israel menandatangani perjanjian Camp David yang diprakarsai AS. Perjanjian itu menjanjikan otonomi terbatas kepada rakyat Palestina di wilayah-wilayah pendudukan Israel. Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin dianugerahi Nobel Perdamaian 1979. namun Israel tetap menolak perundingan dengan PLO dan PLO menolak otonomi. Belakangan, otonomi versi Camp David ini tidak pernah diwujudkan, demikian juga otonomi versi lainnya. Dan AS sebagai pemrakarsanya juga tidak merasa wajib memberi sanksi, bahkan selalu memveto resolusi PBB yang tidak menguntungkan pihak Israel. Israel secara sepihak menyatakan bahwa mulai musim panas 1980 kota Yerusalem yang didudukinya itu resmi sebagai ibukota.

Pada tahun 1982, Israel menyerang Libanon dan membantai ratusan pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila. Pelanggaran terhadap batas-batas internasional ini tidak berhasil dibawa ke forum PBB karena lagi-lagi veto dari Amerika Serikat. Belakangan Israel juga dengan enaknya melakukan serangkaian pemboman atas instalasi militer dan sipil di Iraq, Libya dan Tunis.

Pada tanggal 15 November 1988, diumumkan berdirinya negara Palestina di Aljiria, ibu kota Aljazair. Dengan bentuk negara Republik Parlementer. Ditetapkan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibukota negara dengan Presiden pertamanya adalah Yasser Arafat. Setelah Yasser Arafat mangkat kursi presiden

diduduki oleh Mahmud Abbas. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina beranggotakan 500 orang.⁷⁷

September 1993, Perjanjian Oslo digelar. Sebuah perjanjian yang memasung rakyat Palestina, dan hal ini disetujui oleh dunia. Rakyat Palestina hanya menguasai beberapa wilayah saja, termasuk menyatuhkan kota Jericho dengan Gaza. Artinya, hanya 1.5% saja tanah yang dimiliki rakyat Palestina. Berdasarkan sensus populasi pada tahun 2000, kini tanah Palestina dihuni sekitar delapan juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 4.3 juta lainnya adalah warga Yahudi yang datang dari penjuru dunia termasuk Rusia, Eropa dan Afrika.⁷⁸

k. Periode Tahun 1995-2009

Rabin dibunuh oleh Yigal Amir, seorang Yahudi fanatik. Sebelumnya, di Hebron, seorang Yahudi fanatik membantai puluhan Muslim yang sedang shalat subuh. Hampir tiap orang dewasa di Israel, laki-laki maupun wanita, pernah mendapat latihan dan melakukan wajib militer. Gerakan Palestina yang menuntut kemerdekaan total menteror ke tengah masyarakat Israel dengan bom “bunuh diri”. Targetnya, menggagalkan usaha perdamaian yang tidak adil itu. Sebenarnya “land for peace” diartikan Israel sebagai “Israel dapat tanah, dan Arab Palestina tidak diganggu (bisa hidup damai).”

Pada tahun 1996, Pemilu di Israel dimenangkan secara tipis oleh Netanyahu dari partai kanan, yang berarti kemenangan Yahudi yang anti perdamaian.

⁷⁷ *Ibid*,

⁷⁸ Herry Nurdi, *Op. cit*, hlm. 46-47

Netanyahu mengulur-ulur waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian. Ia menolak adanya negara Palestina, agar Palestina tetap sekedar daerah otonom di dalam Israel. Ia bahkan ingin menunggu/menciptakan kontelasi baru (pemukiman Yahudi di daerah pendudukan, bila perlu perluasan hingga ke Syria dan Yordania) untuk sama sekali membuat perjanjian baru. AS tidak senang bahwa Israel jalan sendiri di luar garis yang ditetapkannya. Namun karena lobby Yahudi di AS terlalu kuat, maka Bill Clinton harus memakai agen-agensya di negara-negara Arab untuk “mengingatkan” si “anak emasnya” ini. Maka sikap negara-negara Arab tiba-tiba kembali memusuhi Israel. Mufti Mesir malah kini memfatwakan jihad terhadap Israel. Sementara itu Uni Eropa (terutama Inggris dan Perancis) juga mencoba “aktif” menjadi penengah, yang sebenarnya juga hanya untuk kepentingan masing-masing dalam rangka menanamkan pengaruhnya di wilayah itu. Mereka juga tidak rela kalau AS “jalan sendiri” tanpa bicara dengan Eropa.

Tahun 2002-2008, sebuah usul perdamaian saat ini adalah Peta menuju perdamaian yang diajukan oleh Empat Serangkai Uni Eropa, Rusia, PBB dan Amerika Serikat pada 17 September 2002. Israel juga telah menerima peta itu namun dengan 14 “reservasi”. Pada saat ini Israel sedang menerapkan sebuah rencana pemisahan diri yang kontroversial yang diajukan oleh Perdana Menteri Ariel Sharon. Menurut rencana yang diajukan kepada AS, Israel menyatakan bahwa ia akan menyingkirkan seluruh “kehadiran sipil dan militer yang permanen” di Jalur Gaza (yaitu 21 pemukiman Yahudi di sana, dan 4 pemukiman di Tepi Barat), namun akan “mengawasi dan mengawal kantong-kantong eksternal di darat, akan mempertahankan kontrol eksklusif di wilayah udara Gaza,

dan akan terus melakukan kegiatan militer di wilayah laut dari Jalur Gaza.” Pemerintah Israel berpendapat bahwa “akibatnya, tidak akan ada dasar untuk mengklaim bahwa Jalur Gaza adalah wilayah pendudukan,” sementara yang lainnya berpendapat bahwa, apabila pemisahan diri itu terjadi, akibat satu-satunya ialah bahwa Israel “akan diizinkan untuk menyelesaikan tembok – artinya, Penghalang Tepi Barat Israel – dan mempertahankan situasi di Tepi Barat seperti adanya sekarang ini”.⁷⁹

Sejak perampasan sebagian besar wilayah Palestina pada tahun 1948, migrasi besar-besaran terus terjadi. Tahun 2006 sekitar 24.500 penduduk Yahudi baru dari berbagai negara akan tinggal dan menetap di Israel. Dari Amerika saja, sebuah lembaga yang mengorganisasi pemberangkatan warga Yahudi Amerika ke Israel, *Nefesh b’Nefesh* memperkirakan akhir 2006, setidaknya mereka meberangkatkan tidak kurang dari 10.500 orang. Sebelumnya, pada tahun 1990 sekiatar 200.000 warga Yahudi yang tinggal di bekas negara Uni Soviet telah masuk dan menjadi warga negara Irael. Maskapai penerbangan Israel sendiri, sejauh ini merasa sangat bersyukur mampu membantu warga Yahudi Amerika untuk kembali ke Israel.⁸⁰

Sementara itu sebelum terjadinya serangan habis-habisan Israel ke Gaza (27/12/2008), sudah terjadi serangan-serangan kecil di antara kedua belah pihak di sekitar Jalur Gaza, disebabkan Israel menutup tempat-tempat penyeberangan atau

⁷⁹ Riaupos, *Op.cit*

⁸⁰ Adhes Satria, *Robohnya Sekolah Kami, Manjala islam sabili: membongkar Rencana Besar Israel Raya*, artikel pada Sabili Edisi No 16 TH. XVI 26 Februari 2009, hal. 50-53

jalur komersial ke Gaza sehingga pasokan bahan bakar minyak terhenti, yang memaksa satu-satunya pusat pembangkit listrik di Jalur Gaza tutup.

Sebagai catatan akhir, Perdana Menteri Israel setelah Benjamin Netanyahu berurut-turut adalah Ehud Barak, Ariel Sharon, dan yang masih berkuasa di Israel dalam penyerangan di Gaza sekarang adalah Ehud Olmert. Sedangkan 4 faksi utama di Palestina adalah PLO, Al-Fatah, Jihad Islam Palestina (JIP), dan yang berkuasa sekarang di Palestina adalah Hamas dengan Perdana Menteri Ismail Haniya.⁸¹

Tepat pada tanggal 27 Desember 2008, Angkatan Udaraq Israel meluncurkan 30 rudal ke sasaran-sasaran di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Seperti diberitakan *Al Jazeera*, serbuan pertama Zionis Israel ini telah membunuh 220 warga Palestina dan 250 lainnya luka-luka. Rudal-rudal juga menghancurkan sejumlah Kantor kepolisian Hamas, dan menewaskan Kepala Polisian Hamas Tawfiq Jaber.

Para saksi mata mengatakan, serangan-serangan itu dilakukan oleh pesawat-pesawat dan helikopter tempur. Asap hitam akibat serangan itu mengepul di langit kota Gaza. Meski peninjau tetap PBB di Palestina telah menjelaskan situasi yang terjadi di Gaza. Namun, pertemuan konsultasi darurat Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Desember 2008 menolak draft resolusi yang ditawarkan Mesir dan Libya (mewakili 22 negara Liga Arab) agar mengutuk Israel dan menghentikan serangannya. Amerika Serikat menilai draft resolusi itu tidak

⁸¹ Riaupos, *loc cit.*

berimbang, sebab tidak menyebutkan penghentian tembakan roket Hamas ke kota-kota di Israel. Bahkan, proposal Prancis untuk gencatan senjata 48 jam di Gaza juga gagal. Nasib serupa juga dialami proposal yang diajukan Turki dan Mesir. Perdana Menteri Israel Ehud Olmer dengan congkak mengatakan, belum tepat memepertimbangkan proposal-proposal itu.

Harian Israel, *Hareetz* menyatakan operasi “Cast Lead” ke Gaza ini memang dipersiapkan sejak enam bulan lalu. Sekitar 60 jet tempur dan heli tempur Israel membombardir 230 titik di Gaza, termasuk mengobrak-abrik simbol-simbol kekuasaan Hamas di Gaza City, Khan Younis, Rafah, Deir Al-Balah, dan Jabaliya. Serangan itu meluluhlantakkan kompleks Kementrian dalam Negeri, kompleks keamanan Hamas dan Universitas Islam di Gaza serta stasiun TV Al-Aqsha milik Hamas.

Sejumlah kapal laut Israel di Laut Mediterania juga ikut menembakkan rudal ke Gaza City. Israel juga menurunkan kendaraan lapis baja di pos perbatasan Erez, Shufa, dan Karni. Pasukan Israel digandakan diperbatasan dengan 6.500 tentara cadangan. Kementrian Pertahanan Israel menyatakan butuh sekitar 10 ribu tentara untuk menggelar operasi militer dengan kekuatan penuh.

Hamas pun membalas Israel dengan menembakkan roket-roketnya ke Ashkelon, sebuah kota di Israel, 13 km dari perbatasan Gaza. Serangan ini menewaskan seorang Arab-Israel dan mencederai delapan lainnya. Sejak serangan udara dimulai, Hamas diperkirakan telah menembakkan 110 roket buatannya.

Hari keempat, mesin-mesin perang Zionis Israel kian membabibuta. Rumah dan flat yang ditinggali penduduk hingga mesjid tidak luput dari pengeboman. Jumlah korban tewas lebih dari 360 orang dan 1.600 terluka. Kalangan sipil yang tewas 27 diantaranya anak-anak. Yang jelas, mesjid-mesjid di Jalur Gaza menjadi sasaran empuk jet-jet tempur zionis Israel sejak 29 Desember 2008, mulai dari Jabaliya hingga Khan Younis. Sudah lima mesjid yang rata dengan tanah akibat serangan tersebut, baik di Khan Younis maupun di Jabaliya. Saat merudal mesjid di Jabaliya, lima gadis kakak beradik tewas seketika.

Tanggal 2 Januari 2009, Israel kembali membombardir Gaza. Jumlah korban jiwa pada hari ketujuh telah mencapai 42 orang dan 2.100 terluka. Hamas pun membalas serangan dengan menembakkan sekitar 30 roket di kawasan selatan Israel, seperti Ashdod, Ashkelon dan Be'er Sheva. Dua orang Israel terluka. Sampai tanggal 3 Januari, militer Israel telah melancarkan lebih dari 750 serangan terhadap Gaza. Sedikitnya telah menewaskan 435 orang Palestina, 75 anak-anak dan 21 wanita tewas dalam serangan tersebut. Sedangkan pejuang di Gaza telah menembakkan sekitar 500 roket dan mortar ke wilayah Israel.

Gerakan maju pasukan darat Israel ke wilayah utara Jalur Gaza Palestina mendapat perlawanan sengit pejuang Hamas. Masing-masing pihak, Israel dan Hamas saling megklaim jumlah pasukannya yang tewas. Malam itu, langit Gaza penuh dengan kilatan peluru dan bola api yang keluar dari tank dan senjata artileri. Dengan diperkuat F16 dan helikopter tempur, Israel menjatuhkan bom-bom ke utara Kota Belt Lahiya, Jabaliya, dan di Beit Hanoun, kota padat

penduduk. Pertempuran sengit juga terjadi di Rafah, wilayah selatan Jalur Gaza yang berbatasan dengan Mesir.

Sampai dengan hari ketiga serangan darat, 80 warga Palestina tewas. Yang jelas, serangan darat Israel membuat sejumlah faksi perjuangan di Gaza berstatus menghadapi Israel, dibawah koordinasi Al Qassam yang memiliki 20 ribu personel bersenjata. Para pejuang mengklaim telah membunuh sejumlah prajurit Israel, menawan dua orang, dan menghancurkan sejumlah kendaraan lapis baja di Distrik Al Tofa, Gaza City.⁸²

⁸² Adhes Satria, *Hari Sabbath Kaum Laknat*, *Op. cit.*, hlm. 36-41